

PENGARUH OPINI AUDIT BPK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019

Andre Bayu Pratama*, Maslichah, dan M. Cholid Mawardi*****

andrebayup50@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The financial performance of local governments is a measure of the success of local governments in managing resources originating from their regions or the central government. Management independently and jointly provide excellent service to society. The purpose of this study is to find out the effect of the Audit Opinion of BPK, Local Revenue (PAD) and Intergovernmental Revenue on the Financial Performance of Local Governments in East Java in 2017-2019, either simultaneously or partially. The research used the associative method with a quantitative approach. The data used secondary data with a time series of three years. The population used the Audit Result Report (LHP) obtained from the Audit Board of Indonesia. The sampling technique used purposive sampling and obtained 29 districts in East Java and 87 LHP for three years. Data analysis used multiple linear regression analysis. Meanwhile, the data processing used IBM Statistical Package for the Social Sciences type 22. The results of this study explain that the Audit Opinion of BPK has no effect on the Financial Performance of Local Governments. The PAD variable has a significant negative effect on the Financial Performance of Local Governments and the Intergovernmental Income variable has a significant negative effect on the Financial Performance of Local Governments.

Keyword: *Audit Opinion BPK, Local Revenue, Intergovernmental Revenue, Financial Performance of Local Government*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 menyebabkan sistem pemerintahan di Indonesia berubah. Perubahan tersebut tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Tujuan otonomi daerah yaitu memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola dan mengatur urusan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Akhmad (2019:170) penilaian kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan pemda yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan belanja daerah terhadap pendapatan daerah.

Adanya otonomi daerah partisipasi masyarakat dapat tersalurkan dan dapat terwujudnya pemda yang baik. Peran masyarakat sangat penting untuk mengawasi keuangan yang dikelola oleh pemda. Dalam melakukan pengawasan secara mendalam diperlukannya peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian terhadap negara. Hasil laporan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) Semester II tahun 2017 terjadi kerugian keuangan (*financial*) Rp2,086 kuadrallion dan jumlah permasalahan sebanyak 4.234 kasus dari 542 pemda. Permasalahan terjadi, dikarenakan adanya ketidaktaatan pemda pada peraturan yang berlaku. Dari kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 pemda atau 23% memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat, 141 pemda atau 26% memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian dan sisanya sebanyak 378 atau 70% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pemberian pernyataan opini WTP oleh BPK RI menjadi tolak ukur bahwa suatu sistem pemerintahan memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dan taat pada peraturan yang berlaku. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur (Jatim) selalu berupaya memberikan kinerja keuangan yang baik, hal tersebut ditandai diberikannya opini WTP dari tahun 2016-2020 secara berturut-turut. Dengan adanya pemberian opini tersebut pemerintah diharapkan dapat mengelola secara maksimal dan dapat mempertanggungjawabkannya terhadap publik atas penggunaan sumber dana dari masyarakat ataupun pemerintah pusat yaitu *local revenue* dan *intergovernmental revenue* (dana perimbangan).

PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan wilayahnya sendiri. Pendapatan ini diperoleh dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayahnya melalui pajak dan retribusi daerah. Semakin besar PAD yang diterima menjelaskan pemda memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat. Sedangkan *Intergovernmental revenue* merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk desentralisasi fiskal. Semakin besar jumlah dana perimbangan yang diperoleh maka dapat menyebabkan tingkat ketergantungan pemda terhadap pusat tinggi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah 1) Bagaimana pengaruh Opini Audit BPK, PAD dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?; 2) Bagaimana pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?; 3) Bagaimana pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?; 4) Bagaimana pengaruh *Intergovernmental Revenue* pada Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Opini Audit BPK, PAD dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur 2017-2019, untuk mengetahui pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019, untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019, dan untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019

Manfaat Penelitian

Kontribusi penelitian sebagai berikut:

1. Praktis
 - a. Bagi pemerintah diharapkan dapat digunakan Pemda sebagai pengambilan kebijakan dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemda.
 - b. Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai Kinerja Keuangan Pemda
2. Teoritis
 - a. Menambah ilmu serta wawasan dalam hal pentingnya Opini Audit BPK, PAD dan *Intergovernmental Revenue* bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat.

II. KERANGKA TEORITIS PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Harto dan Parwanto (2017) ialah teori yang menjelaskan adanya keterhubungan secara kontraktual diantara *agent* dan *principals* yang menekankan pada penyelesaian masalah. Permasalahan yang sering terjadi antara *agent* dan *principals*

yaitu apabila keinginan antara *principals* dan *agent* saling bertolak belakang dan ketika pembagian risiko diantara *agent* dan *principals* memiliki pendapat yang berbeda. Hal tersebut diperjelas oleh Ditasari dan Sudrajat (2020) bahwa adanya pemberian wewenang secara penuh terhadap pemerintah daerah mengakibatkan terjadinya *information asymmetry*.

Otonomi Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi daerah ialah kewajiban, hak dan wewenang daerah dalam mengelola secara mandiri urusan rumah tangga (daerah pemerintahan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah, pemda dinilai berdasarkan dua aspek yaitu pendapatan dan pengeluaran. Tujuan utama adanya otonomi daerah yaitu membangun komunikasi dan partisipasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayahnya baik dalam hal pelayanan dan perekonomian daerah.

Opini Audit BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan Opini Audit BPK merupakan pernyataan *professional* yang dikeluarkan sebagai kesimpulan dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan. Pemberian Opini Audit BPK diberikan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan peraturan yang ditentukan diantaranya 1) kesesuaian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah; 2) pengungkapan yang cukup; 3) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; 4) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu laporan auditor harus dapat memberikan petunjuk yang jelas supaya dapat memberikan pendapat atas LKPD yang sudah selesai diperiksa. Setiadi (2019:36) pendapat opini audit terdapat 4 diantaranya: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3) Tidak Wajar (TW); 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (*local revenue*) merupakan sumber pendapatan ekonomi pemerintah daerah yang diperoleh atas pengelolaan kekayaan daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga adanya PAD pemerintah daerah dapat menambah nilai kekayaan daerahnya. Mardiasmo (2016:15) menjelaskan bahwa *local revenue* terdiri dari 4 sumber utama diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Intergovernmental Revenue

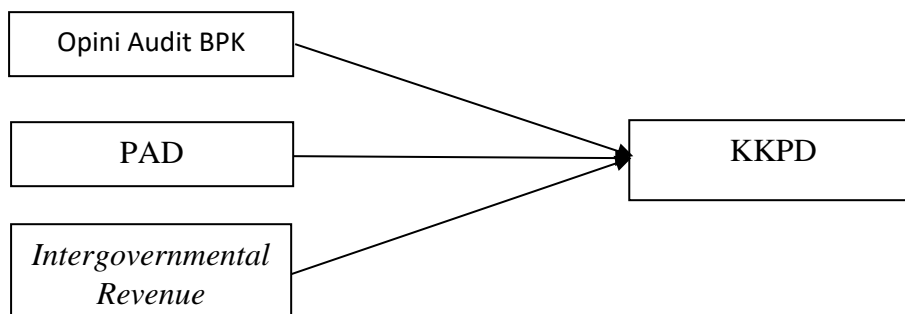
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Intergovernmental Revenue* atau Dana Perimbangan yaitu dana pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Adanya Dana Perimbangan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal. *Intergovernmental Revenue* berdasarkan peraturan yang berlaku terdapat 3 (tiga) jenis diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kinerja Keuangan Pemda

Akhmad (2019:169) Kinerja Keuangan Pemda ialah kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Pengelolaan keuangan Pemda dapat mendukung berjalannya sistem pemerintahan diantaranya pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, transportasi dan pelayanan publik lainnya. Penilaian Kinerja Keuangan Pemda menurut Sukardi dan Kirana (2020) digunakan sebagai parameter keuangan dan non-keuangan yang diperoleh setelah melakukan aktivitas. Majid (2019:168) informasi keuangan diukur dengan menganalisis varians kinerja yang dianggarkan sedangkan informasi non-keuangan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akhmad (2019:169) berpendapat cara untuk menilai Kinerja Keuangan Pemda dengan cara menganalisis rasio

keuangan daerah terhadap APBD diantaranya 1) Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerahnya terutama dalam membiayai kegiatan operasional, pembangunan dan pelayanan masyarakat; 2) Rasio Efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan terhadap anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mencukupi pelayanan kepada masyarakat; 3) Rasio Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah menggunakan pendapatan untuk dibelanjakan dengan mengorbankan seminimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik; 4) Rasio Keserasian Belanja digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah menggunakan dana publik yang digunakan untuk membelanjakan pelayanan publik.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

H₁ : Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019

H_{1a}: Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.

H_{1b}: Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.

H_{1c}: *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif menurut Sugiyono (2015:44) bertujuan untuk mengetahui keterhubungan secara parsial ataupun simultan antara variabel bebas (Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah, dan *Intergovernmental Revenue*) dan variabel terikat (Kinerja Keuangan Pemda). Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh dari BPK RI melalui e-ppid.go.id.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2019. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu kabupaten di Jawa Timur yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kabupaten yang telah di audit oleh BPK RI tahun 2017-2019.

Pengukuran dan Operasional Variabel

Variabel bebas pada riset ini yaitu Opini Audit BPK, PAD, dan *Intergovernmental Revenue*. Sedangkan variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemda. Pengukuran dan operasional variabel yang digunakan dalam riset ini diantaranya:

1. Opini Audit BPK (X_1) menurut Sukardi dan Kirana (2020) di ukur menggunakan metode skoring yang mana pernyataan BPK RI tersebut dikelompokkan sebagai berikut: 1) Wajar Tanpa Pengecualian = skor 4; 2) Wajar Dengan Pengecualian = skor 3; 3) Tidak Wajar = Skor 2; 4) Tidak Memberikan Pendapat = skor 1. Pemberian skor ini berdasarkan pernyataan yang memiliki kualitas terbaik sampai kualitas tidak baik.
2. PAD (X_2) menurut Mardianis, *et al* (2017) di ukur dengan membandingkan pendapatan daerah yang diperoleh sebenarnya yang diakibatkan mengelola aset daerahnya sendiri dengan membandingkan total pendapatan pemerintah daerah yang sebenarnya. Pengukuran PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD = \frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemda}} \times 100\%$$

3. *Intergovernmental Revenue* (X_3) menurut Indrawati, *et al* (2020) di ukur dengan membandingkan sumber dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dibandingkan dengan total pendapatan pemda yang sebenarnya. Pengukuran *Intergovernmental Revenue* dirumuskan sebagai berikut:

$$IR = \frac{\sum \text{Realisasi Intergovernmental Revenue}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemda}} \times 100\%$$

4. Kinerja Keuangan Pemda (Y) di ukur menggunakan rasio efisiensi. Menurut Akhmad (2019:170) rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\sum \text{Realisasi Belanja Daerah}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemda}} \times 100\%$$

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Siyoto dan Sodik (2015:77) metode dokumentasi ialah data yang diperoleh dari buku yang berupa catatan-catatan perusahaan. Hal tersebut digunakan bertujuan untuk menjawab fenomena-fenomena yang terjadi dalam riset ini. Data yang digunakan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemda Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 yang dikeluarkan oleh BPK RI. Sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 87 LHP pemerintah daerah kabupaten dari tahun 2017-2019.

Metode Analisis Data

Analisis data pada riset ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Fadli dan Ananda (2015:29) menjelaskan bahwa statistik deskriptif ialah statistik yang digunakan untuk meringkas suatu gambaran fenomena yang terjadi serta menarik sebuah kesimpulan secara general. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai (angka) dari variabel bebas dan terikat. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu program *Statistical Package for the Social Sciences* tipe 22.

IV. Hasil Penelitian Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OA BPK (X ₁)	87	1.00	4.00	3.9310	.36705
PAD (x ₂)	87	.08	.41	.1584	.06587
IR (x ₃)	87	.40	.79	.6384	.06991
KKPD (Y)	87	.64	1.12	.9649	.06575
Valid N (listwise)	87				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 dapat dijelaskan secara jelas sebagai berikut 1) Opini Audit BPK (OA BPK) merupakan variabel independen (X₁); menjelaskan bahwa nilai terendah 1,00; nilai tertinggi 4,00; nilai rata-rata 3,9310 dan nilai standar deviasi 0,36705; 2) PAD merupakan variabel independen (X₂); menjelaskan bahwa nilai terendah 0,08; nilai tertinggi 0,41; nilai rata-rata 0,1584 dan nilai standar deviasi 0,06587; 3) *Intergovernmental Revenue* merupakan variabel independen (X₃); menjelaskan bahwa nilai terendah 0,40; nilai tertinggi 0,79; nilai rata-rata 0,6384 dan nilai standar deviasi 0,06991; 4) KKPD merupakan variabel dependen (Y); menjelaskan bahwa nilai terendah 0,64; nilai tertinggi 1,12; nilai rata-rata 0,9649 dan nilai standar deviasi 0,6575.

Hasil Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas menggunakan alat uji *One Sample K-S* menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan nilai Asymp Sig. (*2-tailed*) KKPD, OA BPK, PAD dan IR bernilai lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		KKPD	OA BPK	PAD	IR
N		87	87	87	87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.4807	.3988	.6230	.3790
	Std. Deviation	.06362	.09121	.05594	.08973
Most Extreme Differences	Absolute	.121	.144	.137	.112
	Positive	.121	.115	.137	.112
	Negative	-.107	-.144	-.082	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		1.125	1.341	1.277	1.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159	.055	.077	.229
a. Test distribution is Normal.					
b. Calculated from data.					

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.411	.154		9.191	.000
OA BPK	-.020	.019	-.112	-1.070	.288
PAD	-.382	.177	-.383	-2.154	.034
IR	-.481	.167	-.512	-2.880	.005

a. Dependent Variable: KKPD

Hasil uji regresi linier berganda berdasarkan tabel 4.3 secara *constant* memiliki nilai Beta sebesar 1.411, Opini Audit BPK (OA BPK) memperoleh nilai Beta (β_1) -0,020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai Beta (β_2) -0,382, dan *Intergovernmental Revenue* (IR) memperoleh nilai Beta (β_3) -0,481. Sehingga hasil analisis regresi linier berganda dapat dibuat sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

$$KKPD = 1.411 + (-0.020).OA + (-382).PAD + (-481).IR + \dots e$$

(0.288) (0.034) (0.005)

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menjelaskan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	1.411	.154		9.191	.000		
OA BPK	-.020	.019	-.112	-1.070	.288	.996	1.004
PAD	-.382	.177	-.383	-2.154	.034	.343	2.916
IR	-.481	.167	-.512	-2.880	.005	.343	2.913

a. Dependent Variable: KKPD

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa variabel Opini Audit BPK memiliki nilai *tolerance* 0,996 > 0,10 dan nilai VIF 1,004 < 10,00, kemudian variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *tolerance* 0,343 > 0,10 dan nilai VIF 2,916 < 10,00 serta variabel *Intergovernmental Revenue* memiliki nilai *tolerance* 0,343 > 0,10 dan nilai VIF 2,913 < 10,00. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10,00 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas menjelaskan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Pengujian penelitian ini menggunakan *Rank Spearman* Hasil pengujian dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations						
		OA BPK	PAD	IR	KKPD	
Spearman's rho	OA BPK	1.000	-.162	.036	-.080	
	Correlation Coefficient					
	Sig. (2-tailed)		.133	.741	.461	
	N	87	87	87	87	
PAD	Correlation Coefficient	-.162	1.000	-.631**	-.007	
	Sig. (2-tailed)	.133		.000	.949	
	N	87	87	87	87	
IR	Correlation Coefficient	.036	-.631**	1.000	-.052	
	Sig. (2-tailed)	.741	.000		.631	
	N	87	87	87	87	
KKPD	Correlation Coefficient	-.080	-.007	-.052	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.461	.949	.631		
	N	87	87	87	87	

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa nilai Sig. (2-tailed) variabel Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah dan *Intergovernmental Revenue* memiliki nilai lebih dari 0,05. Sehingga model regresi yang digunakan dalam riset ini layak digunakan.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menjelaskan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Pengujian penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* Hasil pengujian dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.317 ^a	.100	.068	.06348	1.795
a. Predictors: (Constant), IR, OA BPK, PAD					
b. Dependent Variable: KKPD					

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa nilai dW sebesar 1,795. Sedangkan nilai table dW dengan signifikansi 0,05; jumlah data 87; variabel independen 3; nilai dL 1,5808 dan nilai dU 1,7232. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa nilai $dU < dW < 4-dU$ dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi di antara variabel independen.

Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji F

Hasil uji F menjelaskan bahwa terjadi pengaruh secara simultan dalam model regresi. Hasil pengujian dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.037	3	.012	3.082	.032 ^b
Residual	.335	83	.004		
Total	.372	86			
a. Dependent Variable: KKPD					
b. Predictors: (Constant), OA BPK, PAD, IR					

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$ sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga Opini Audit BPK, PAD, dan *Intergovernmental Revenue* dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemda.

b. Hasil Uji R²

Hasil dari uji R² menjelaskan bahwa variabel yang digunakan dalam riset ini dapat menerangkan keterhubungan sebesar 0,068 (6,8%) dan lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.317 ^a	.100	.068	.06348
a. Predictors: (Constant), IR, OA, PAD				

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa Opini Audit BPK, PAD dan *Intergovernmental Revenue* pada Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jawa Timur

tahun 2017-2019 sebesar 6,8% dan selebihnya sebesar 93,2% (100%-6,8%) di pengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi riset ini.

c. Hasil Uji t

Hasil dari uji t menjelaskan bahwa variabel bebas PAD dan *Intergovernmental Revenue* memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemda. Sedangkan Opini Audit BPK tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda. Hasil pengujian dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.411	.154		9.191	.000
OA BPK	-.020	.019	-.112	-1.070	.288
PAD	-.382	.177	-.383	-2.154	.034
IR	-.481	.167	-.512	-2.880	.005

a. Dependent Variable: KKPD

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa Opini Audit BPK tidak memiliki pengaruh KKPD dikarenakan nilai Sig 0,288>0,05 dan nilai beta -0,020. Kemudian PAD mempengaruhi negatif signifikan terhadap KKPD. Hal tersebut dikarenakan nilai Sig 0,034<0,05 dan nilai beta -0,382. Sedangkan *Intergovernmental Revenue* mempengaruhi negatif signifikan terhadap KKPD. Hal tersebut dikarenakan nilai Sig 0,005<0,05 dan nilai beta -0,512.

V. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten di Jatim dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Opini Audit BPK tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda.
2. PAD dapat mempengaruhi signifikan negatif pada Kinerja Keuangan Pemda.
3. *Intergovernmental Revenue* dapat mempengaruhi signifikan pada Kinerja Keuangan Pemda.

Keterbatasan

Penelitian ini dilaksanakan secara ilmiah supaya memperoleh hasil yang maksimal. Namun dalam realita riset ini masih terdapat keterbatasan, diantaranya:

1. Sampel yang digunakan hanya pemerintah daerah kabupaten yang ada di Provinsi Jatim, sehingga belum mencakup keseluruhan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini pada variabel terikat hanya berfokus pada satu rasio kinerja keuangan pemda yaitu rasio efisiensi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas diantaranya Opini Audit BPK, PAD dan *Intergovernmental Revenue*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan dan keterbatasan. Maka terdapat saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah objek penelitian yang di pakai yaitu pemerintah kota di provinsi Jatim.
2. Bagi peneliti berikutnya pada variabel terikat dapat menggunakan dapat menambahkan rasio Kinerja Keuangan Pemda lainnya yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio keserasian belanja

3. Bagi peneliti berikutnya pada variabel bebas dapat menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda diantaranya Belanja Modal, Belanja Operasi, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah, dan SiLPA.

Daftar Pustaka

- Akhmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Azkiya.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*.
- Ditasari, Rollis Ayu, dan M. Agu. Sudrajat. 2020. "Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur." *Inventory* 4(2):104–17.
- Fadhli, Muhammad, dan Rusydi Ananda. 2018. *Statistika Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan*. Medan: Widya Puspita.
- Harto, Puji, dan Endri Parwanto. 2017. "Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah" *Diponegoro Journal of Accounting* 6(1):2337–46.
- Indrawati, Novita, Yesi Mutia Basri, dan Taufik Dasmal. 2020. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Al Iqtishad* 2(16):39–57.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Mardianis, Enggar Arum, D.P, dan H. Afrizal. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA* 2(3):1–28.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Setiadi. 2019. *Pemeriksaan Akuntansi (Teori Dan Praktek)*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media.
- Sukardi, dan Akhila Santika Kirana. 2020. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun 2018)." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani* 8(2):175–92.
- Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/menteri-keuangan-sri-mulyani-apresiasi-pemprov-jatim-raih-wtp-lebih-dari-lima-kali/> (diakses pada 18 Oktober 2021)

*) **Andre Bayu Pratama** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Maslichah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

***) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang